

## KONSEP MISKIN INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN: SEBUAH ANALISIS WACANA MICHEL FOUCAULT

**Ana Afida**

UIN Walisongo Semarang  
[ana\\_afida@walisongo.ac.id](mailto:ana_afida@walisongo.ac.id)

**ABSTRACT** - This paper aims to describe the thoughts of a philosopher about the concept of poor information. The information gap in society is the result of a lack of ability to access information efficiently and apply it properly. The role of the library as a learning medium and information center is an important part of inviting the public to overcome the information gap. In today's era, the connotations of the economic side and information material tend to describe information as a homogeneous entity. Michel Foucault, a post-structuralist philosopher, stated that in Foucauldian discourse analysis, an analysis of "poor information" can be achieved by positioning it as a different concept, namely that knowledge is imbued with power (power) if it is manifested in cadres or groups. - professional groups'. the construction of "information poor" is directly related to professional responsibilities and, moreover, to education. Meanwhile, according to what has been identified in economic rhetoric, the concept of "poor information", here identified as illiterate people, the poor and rural people, must turn into a consumer. The role of the library in this case is as a safety agent that ensures that library users are not only part of the traditional users who are part of this world of information, but also reach out to other users.

**Keywords:** poor information; library; Michel Foucault

**ABSTRAK** - Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran seorang filosof tentang konsep miskin informasi. Kesenjangan informasi dalam masyarakat adalah sebagai akibat dari kurangnya kemampuan dalam melakukan akses informasi yang efisien dan menerapkan dengan tepat. Peran perpustakaan sebagai media pembelajaran dan pusat informasi menjadi bagian penting dalam mengajak masyarakat untuk mengentaskan kesenjangan informasi. Di era seperti saat ini, konotasi sisi ekonomi dan materi informasi cenderung menggambarkan informasi sebagai entitas yang homogen. Michel Foucault, seorang ahli falsafah beraliran post-strukturalisme, menyatakan bahwa dalam analisis wacana Foucauldian, analisis tentang "miskin informasi" bisa dicapai dengan memposisikan sebagai konsep yang berbeda, yaitu bahwa pengetahuan dijiwai dengan kuasa (kekuasaan) jika diwujudkan dalam kader-kader atau kelompok-kelompok profesional'. konstruksi "miskin informasi" secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab profesi dan, terlebih lagi, ke pendidikan.. Sedangkan sesuai dengan yang telah diidentifikasi retorika ekonomistik, konsep "miskin informasi", di sini diidentifikasi sebagai masyarakat buta huruf, kaum miskin dan masyarakat pedesaan, harus berubah menjadi konsumen. Peran perpustakaan dalam hal ini adalah sebagai agen keselamatan yang menjamin bahwa pengguna perpustakaan itu bukan hanya bagian dari pengguna tradisional saja yang menjadi bagian dari dunia informasi ini, tetapi juga menjangkau pengguna lainnya.

**Kata Kunci:** miskin informasi; perpustakaan; Michel Foucault

## A. PENDAHULUAN

Miskin informasi sebagai sebuah konsep dalam ilmu perpustakaan dan ilmu informasi yang telah mengemuka pada tahun 1960an. Konsep ini muncul sebagai elemen integral dari perdebatan masyarakat informasi yang dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Konsep ini adalah untuk menggolongkan kelompok-kelompok yang menderita, terpinggirkan, termarjinalkan, yang dianggap sebagai bentuk-bentuk lain dari perampasan atau kekurangan, yang dikonstruksi atas dasar “kekurangan”. Kelompok yang dianggap miskin informasi ini antara lain adalah masyarakat pedesaan, kelas pekerja, orang tua, perempuan, para pengangguran, orang cacat, tuna wisma, etnis minoritas, dan negara - negara berkembang, baik secara individu maupun yang digambarkan sebagai kategori homogen.

Berdasarkan pemahaman wacana foucauldian, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis dan mendekonstruksi gagasan tentang “kemiskinan informasi” atau “miskin informasi” seperti yang muncul belakangan ini di dalam ilmu perpustakaan dan informasi dan untuk

menelaah bagaimana hasil dalam objektifikasi tentang “miskin informasi” sebagai suatu kelompok, yang kemudian tunduk pada intervensi. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep dan strategi-strategi yang mengarah pada konstruksi miskin informasi sebagai sebuah kelompok, dan kemudian untuk mengekspos beberapa asumsi yang mendasarinya.

Berdasarkan perbedaan pembedaan karakterisasi kelompok individu, organisasi, bahkan negara oleh kurangnya informasi, asumsi yang mendasarinya harus ada suatu kuantitas informasi yang tepat. Jadi dapat diargumentasikan bahwa eksistensi dan kodrat (sifat) serta posisi dan kuantitas dari jenis informasi ditentukan, diproduksi dan dipelihara dari posisi istimewa oleh sistem wacana kelembagaan otoritatif (yang berkuasa).

Pengkonstruksian kemiskinan itu sendiri sebagai problematisasi dalam konteks pembangunan. Konsep kemiskinan muncul untuk mendukung pembangunan negara berkembang sehingga memunculkan adanya formasi diskursif yang didasarkan pada gagasan pembangunan (Escobar:1995).

Jika kemiskinan dikaitkan dengan informasi, maka konsep informasi memungkinkan kelangkaan dan mengarah pada ciri informasi yang diperdagangkan (komoditas informasi). Lebih lanjut, konotasi sisi ekonomi dan materi informasi cenderung untuk menyampaikan gambaran informasi sebagai entitas yang hampir homogen. Hal ini mengakibatkan mengabaikan aspek sosial dan komunikatif informasi dan khususnya penggunaan informasi yang akan memungkinkan keterlibatan yang serius dengan berbagai jenis praktik-praktik informasi dengan mempertimbangkan berbagai kondisi sosial.

Mendiskusikan proses sintesis wacana dimana kombinasi dua konsep menghasilkan penciptaan sebuah konsep baru dengan pemahaman yang berbeda, dalam konteks investigasi tentang literasi informasi sebagai "hubungan kontradiksi". Kombinasi informasi dan kemiskinan tampak seperti hubungan kontradiksi, yang mengarah pada pemahaman yang baru dan diperluas, namun pada saat yang sama konsep dibatasi, dimana keduanya mengubah makna masing-masing untuk membentuk dan memberikan kontribusi

pada gagasan yang unik dan berbeda. Demikian pula "miskin informasi" seperti dalam literasi informasi adalah gabungan dua konsep yang bermuatan sangat kuat dan politis, keduanya terkait dengan agenda tertentu yang relevan dengan masyarakat kontemporer.

Menurut Liangzhi [89] Yu (2006, hal 230), Di dalam ilmu perpustakaan dan informasi, "miskin informasi" berada dalam sederetan literatur tentang "kesenjangan informasi (digital divide)", "gap informasi", dan senyawa (gabungan) serupa yang semuanya dalam tradisi perdebatan dari tahun 1960-an dan 1980-an, namun semuanya mengambil sudut pandang tertentu. "ketimpangan informasi" dari literatur yang lebih baru dan perdebatan mengenai "kesenjangan digital" atau "akses universal", yang terutama terikat pada munculnya internet.

## B. LANDASAN TEORI

### Miskin Informasi

Konsep kemiskinan memperluas pandangan ilmu sosial, bahwa kemiskinan tidak hanya sebatas ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pendapatan, akan tetapi lebih kepada

ketidakmampuan manusia untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidupnya termasuk dalam akses informasi.

Menurut Kotze(dalam Hikmat : 2004), bahwa masyarakat miskin sebenarnya mempunyai kemampuan yang relative baik untuk mendapatkan kesempatan yang ada, namun mereka kadang masih bergantung pada dukungan dari luar. Sedangkan menurut supriatna (1997), mengatakan kemiskinan merupakan kondisi yang terbatas bukan karena kemauannya. Miskin ditandai dengan rendahnya Pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, Kesehatan, gizi dan kesejahteraan kualitas hidupnya. Hal ini juga bisa disebabkan oleh sumber daya manusianya yang pada akhirnya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan meleak informasinya.

Dikatakan oleh Laksmi (2020), setiap Orang memiliki kebutuhan dan pola pencarian informasi yang berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi dari beberapa factor, dianatranya factor Pendidikan, status sosial termasuk lingkup pergaulan dan pengalamannya.

Istilah miskin informasi yang dikutip dari Goulding oleh Jaeger(2004) yaitu orang-orang yang dikelilingi informasi yang berlimpah dan dan kemudahan akses informasinya, namun mereka tidak tahu bagaimana dan dimana mendapatkan informasi dan tidak mengerti informasi. Peradaban manusia berawal dari keberadaan informasi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merubah pola piker manusi dengan informasi yang diperolehnya. Sebagaimana dikatakan oleh Toffler (2000), barang siapa memegang akses informasi, dialah yang akan menang dalam persaingan. Berangkat dari pernyataan tersebut, bahwa informasi sangat penting untuk membantu manusia dalam menyelesaikan masalah tanpa harus minta bantuan pada orang lain.

Informasi merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan yang melekat meskipun tidak secara eksplisit. Dalam semua aspek kehidupan manusia, informasi berperan penting diberbagai profesi sehingga dapat menentukan keberadaan bidang yang ditekuninya. Kesenjangan

informasi dapat mengurangi peluang dalam setiap profesinya.

Himayah (2013) menyebutkan kemiskinan informasi adalah suatu kondisi dimana individu atau masyarakat tidak mempunyai keahlian untuk memahami kebutuhan, menggunakan, menafsirkan dan menerapkan dalam kehidupannya. Miskin informasi yaitu suatu masalah social yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak individu yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan.

Konsep miskin informasi merupakan hal baru bermula dari melimpahnya informasi yang tidak bisa dibendung oleh masyarakat. Namun demikian masih banyak juga masyarakat yang miskin informasi. Ada 3 hal yang dapat membedakan bahwa masyarakat itu dalam situasi miskin informasi dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan koneksi informasi, konten informasi dan dari aspek manusia itu sendiri (Britz : 2004). Pendekatan itu dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Konektivitas informasi

Di era informasi saat ini, manusia sangat mudah untuk mendapatkan informasi diseluruh

belahan dunia. Akses informasi dapat diperoleh melalui berbagai media. Asumsi bahwa masyarakat yang dimudahkan mengakses informasi memiliki lebih banyak secara finansial, sedangkan masyarakat yang miskin informasi itu karena mereka tidak memiliki kemampuan teknologi dan secara finansial juga terbatas. Dalam laporan *Administrative Committee on Coordination* (1997), bahwa salah satu penyebab utama kemiskinan informasi di Negara berkembang merupakan akibat kurangnya akses teknologi informasi.

#### 2. Konten informasi

Dalam pendekatan ini tidak tersedianya informasi yang berkualitas dan kurangnya akses yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Burgelman (pada Britz : 2004) menyatakan bahwa perbedaan masyarakat kaya dan miskin informasi tidak sebatas pada masalah digitalisasi informasi, namun juga pada keterbatasan akses, ketersediaan dan kesesuaian informasi yang didapatkan. Anggapan secara

umum, bahwa masyarakat miskin tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi secara tepat dan cepat.

### 3. Aspek manusia

Yang menjadi penyebab miskin informasi tidak hanya dari akses informasi yang dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat. Namun informasi dilihat sebagai konstruksi sosial yang bisa membantu manusia dalam pengambilan keputusan. Karakteristik miskin informasi adalah sebuah fenomena sosial yang sangat pelik dan berkaitan dengan factor geografis. Manusia kadang tidak mengetahui informasi yang mereka ketahui. Intinya bahwa ketidakmampuan menginterpretasikan dan menerapkan informasi secara efektif dan efisien, menyebabkan manusia miskin informasi.

Kemiskinan identik dengan kondisi seseorang yang tidak sejahtera, tidak memiliki banyak harta dan serba kekurangan dalam kehidupan sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang mencakup

politik, ekonomi, social, asset dan akses.(Tuti Widyastuti : 2010)

### **Perpustakaan dan Masyarakat Melek Informasi**

Trend masyarakat saat ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Informasi sekarang sudah menjadi keutuhan banyak orang. Jika ada berita yang viral, masyarakat akan langsung menyebarkan tanpa melihat kebenaran dari informasi yang diterimanya. Perkembangan teknologi informasi sangat berdampak pada penyebaran informasi pada masyarakat luas. Sehingga kadang muncul berita-berita hoax yang tersebar di kalangan masyarakat yang dalam notabene tidak melek informasi.

Literasi informasi saat ini gaungnya sudah sampai ke daerah pelosok. Dalam segala hal sekarang dikaitkan dengan literasi informasi. Misalnya, literasi keluarga, literasi kesehatan, literasi pernikahan dan sebagainya. Semua dikaitkan dengan literasi. Ini menunjukkan bahwa kita sedang mengupayakan agar anggapan miskin informasi bisa hilang dari masyarakat marginal. Keterampilan bagaimana cara menggunakan teknologi informasi untuk memecahkan masalah dari mereka.

Dahsyatnya ledakan informasi ini menjadi pekerjaan berat bagi perpustakaan agar tetap eksis dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Perpustakaan merupakan lembaga yang sangat penting dalam kegiatan untuk merubah kehidupan bangsa melalui perannya untuk memperkayan informasi melalui koleksi dan fasilitas-fasilitasnya. Memasuki era perubahan iklim informasi.

Menurut Zurkowski dalam Rhoni Rodin (2020) bahwa masyarakat yang mampu dan terampil dalam menggunakan sumber informasi dalam bidang pekerjaannya bisa disebut sebagai masyarakat melek informasi. Dua tahun kemudian Burchinal mengemukakan istilah yang lebih kompleks yaitu untuk menjadi orang yang melek informasi dibutuhkan kemampuan banyak ketrampilan baru, antara lain kemampuan untuk menempatkan dan menggunakan informasi untuk kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan secara tepat.

Di Amerika Serikat teori tentang masyarakat informasi ini mengemuka sejak tahun 1962, yaitu dengan keluarnya buku *The Production and Distribution of Knowledge in The United States* yang

ditulis oleh Fritz Machlup, yang memandang dari sisi ekonomi dibahas tentang *knowledge industry* (Pendit : 2006), selanjutnya Pendit(2006) menyatakan bahwa teori Machlup berdasar pada prinsip interdisipliner, kelemahannya adalah *intellectual statelessness*.

Di samping teori machlup, ada juga teori Manuel Castells yang meyoroti hal *network society* yang dihungkan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang saat ini hamper semua beralih ke media digital. Castells dalam Pendit (2006) disebutkan bahwa masyarakat berjaringan mempunyai lima ciri yaitu :

1. Berbasis ekonomi kapitalis 'informasional' (rejuvenated form of capitalism)
2. Ekonomi dikelola secara global, tidak terbatas oleh negara-negara
3. Pengalaman manusia tentang waktu dan ruang dialihkan ke "*timeless time*" dan "*space of flows*"
4. Kekuasaan merupakan kunci dari akses ke jaringan dan kendali atas aliran. Inklusi dan eksklusi menjadi penentu kekuasaan seseorang
5. Sumber utama adanya konflik dan penentangan dalam masyarakat

jaringan adalah kontradiksi antara *placeless* dan *rootedness* manusia

Peran perpustakaan sebagai penyedia informasi di era informasi ini membawa kepada perubahan peradaban dalam kehidupan manusia. Perpustakaan saat ini menjadi aktif mengikuti perkembangan teknologi dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat informasi. Revolusi teknologi informasi sangat berpengaruh besar pada perubahan layanan dan peran perpustakaan untuk mengajak masyarakat untuk mengenal dunia lebih luas melalui kemampuan informasinya.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pencarian informasi. Selain itu perubahan teknologi informasi yang begitu pesat, memaksa manusia mau tidak mau harus menyesuaikan dan menuntut pola pikir kita dengan perkembangan teknologi yang ada, agar masyarakat tidak ketinggalan informasi. Dengan kemampuan teknologi, perpustakaan akan lebih mudah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Fenomena perpustakaan digital sekarang sudah menjadi trend di masyarakat Indonesia. Saat ini banyak

orang membutuhkan koleksi perpustakaan tanpa harus datang ke perpustakaan. Dengan demikian eksistensi perpustakaan dalam masyarakat informasi berfungsi sebagai Lembaga yang mendukung penuh untuk perubahan pola pikir manusia dengan literasi informasinya.

### C. METODE

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan studi literatur terhadap pemikiran Michel Foucault yang dihubungkan dengan teori-teori mengenai peran perpustakaan sebagai agen perubahan untuk masyarakat miskin Informasi. Dari hasil analisis, bahwa perpustakaan mempunyai peran penting sebagai penyelamatan masyarakat miskin informasi. Hal ini dapat memotivasi perpustakaan dalam menunjukkan kemampuannya menjadi penghubung informasi masyarakat. Dengan perkembangan teknologi internet yang begitu cepat, perpustakaan juga harus membuat inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat penggunanya.



## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis wacana dan pengertian wacana**

#### **Michel Foucault**

Istilah wacana atau diskursus dipopulerkan oleh Foucault dan merupakan konsep penting dalam pemikirannya. Istilah wacana ini dikemukakan Foucault dalam upaya menemukan kembali suatu pandangan ke dalam tentang subyek atau suara orang-orang gila dari orang gila itu sendiri dan bukan suara -suara orang dari luar diri mereka. Wacana dalam pengertian ini adalah keseluruhan bidang (domain) dimana bahasa dipakai dalam tata cara tertentu. jadi wacana tentang kegilaan dalam masyarakat modern itu berakar dari lembaga-lembaga, seperti rumah sakit dan praktek psikiatri. dalam arti yang lebih luas, wacana berarti segala sesuatu yang ditulis atau diucapkan atau yang dikomunikasikan dengan menggunakan tanda-tanda. Wacana adalah kumpulan pernyataan-pernyataan (Yusuf Akhyar: 2009).

Maka dengan berdasar pada analisis wacana Foucauldian, analisis tentang "miskin informasi" bisa dicapai dengan memosisikan sebagai konsep yang berbeda. ke-Informasi-an

dipandang sebagai kontingen kelembagaan. Pengetahuan itu sendiri dipahami sebagai deligitimasi secara kelembagaan. Stuart, Secara garis besar, pemikiran foucauldian " bahwa pengetahuan dijiwai dengan kuasa (kekuasaan) jika diwujudkan dalam kader-kader atau kelompok-kelompok profesional". Dengan demikian, kajian wacana-wacana dominan yang memberikan karakter pengetahuan otoritatif dan terlembagakan ke dalam pertimbangan yang memberikan wawasan tentang makna bahasa informasi dan komunikasi yang dikonstruksi. (Haider & Bawden: 2007)

Sebagai kerangka teoritis ini memiliki beberapa implikasi. Oleh karena itu, hal ini perlu untuk menguraikan secara singkat implikasi gagasan wacana Foucauldian. Dalam konteks ini konsep-konsep yang terkait dari pernyataan akan dibahas dan karakter saling bergantung dari kekuasaan, pengetahuan, dan khususnya pengetahuan ahli secara khusus akan dijelaskan secara singkat.

### **Kekuasaan, pengetahuan dan ahli pengetahuan**

Michel Foucault, seorang ahli falsafah beraliran post-strukturalisme dari Perancis yang banyak melakukan

penelitian dan pengamatan berkaitan dengan budaya, mengatakan bahwa transmisi pengetahuan adalah pusat dari budaya, yang prosesnya tidak linear, dan dihubungkan dengan kekuasaan secara sadar atau tidak. Dalam realitas sosial kebenaran dibangun dalam hubungan kekuasaan-pengetahuan, dan bagaimana hubungan ini beroperasi dalam formasi diskursif, kerangka konseptual yang memungkinkan cara berfikir. Contoh yang sederhana dalam mengamati proses ini adalah bahwa Naek El Tobing atau Boyke lebih punya pengetahuan ketika berbicara tentang seks, karena itu ia dianggap punya kekuasaan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan seks tersebut. Contoh lain, ahli klasifikasi Islam dalam ilmu perpustakaan adalah Moh. Kailani. Pengetahuan yang mereka sampaikan akan diterima sebagai kebenaran, sampai sebuah pengetahuan lain mampu mematahkan kebenaran mereka dan menunjukkan kebenaran lain yang beralasan lebih kuat (logis, analisis dan argumentative).

Dalam penganalisaan wacana Foucault lebih memperhatikan bagaimana bahasa digunakan dan bagaimana penggunaan bahasa selalu

diartikulasikan dengan praktek sosial budaya. Penggunaan bahasa dan praktek budaya secara umum dilihat sebagai sesuatu yang bersifat dialogis, dalam dialog dan konflik potensial dengan penggunaan lain bahasa tersebut. *Dalam pengertian ini maka wacana tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan. Wacana adalah alat di mana institusi mendapatkan kekuasaannya melalui proses definisi dan eksklusi.* Artinya wacana tertentu atau formasi diskursif menentukan apa yang mungkin dikatakan pada topik tertentu. Formasi diskursif terdiri dari peraturan yang tidak tertulis yang berusaha mengatur apa yang dapat ditulis, difikir dan dilakukan pada hal-hal tertentu, seperti contoh diatas. Atau contoh lain bahwa kata-kata seorang Kadi yang menikahkan hanya bisa bermakna dalam suasana pernikahan.

Kekuasaan terlaksana melalui wacana dan wacana selalu berakar pada kekuasaan. Menurut Foucault kekuasaan memproduksi pengetahuan, tidak ada hubungan kekuasaan tanpa konstitusi korelatif dari bidang pengetahuan, begitu juga tidak ada pengetahuan yang tidak mensyaratkan dan pada saat bersamaan merupakan hubungan-hubungan kekuasaan (relasi kekuasaan).

Kekuasaan yang dilihat Foucault bukan sebagai kekuasaan kelas dan tidak dilihat sebagai kekuasaan yang negatif. Bahkan menurutnya kekuasaan itu produktif. Meskipun tidak membutuhkan karena mereka sudah cukup banyak tahu dan bisa mengekspresikan diri mereka. Hanya saja ada sistem kekuasaan yang memblok, melarang, dan membuat invalid wacana dan pengetahuan. Kekuasaan ini tidak hanya ditemukan pada pelaksanaan penguasa dalam menyensor tetapi dapat dirasakan secara dalam dan menembus keseluruhan jaringan sosial. Menurut Foucault intelektual tidak lagi dapat dianggap sebagai barisan depan tanpa kekuasaan bermain di dalamnya. Aktivitas intelektual selama periode tertentu didominasi oleh kode-kode spesifik pengetahuan yang tergantung kepada kepercayaan, teknologi dan susunan sosial yang tersedia. Dengan teori Foucault inilah bisa ditelusuri bagaimana pengetahuan dibangun dan bagaimana pengetahuan tersebut dengan kekuasaan tertentu digiring menjadi kebenaran demi kekuasaan itu sendiri.

Selanjutnya Edward Said seorang post-strukturalis dari Palestina, yang

telah mengamati Barat dan Timur selama bertahun-tahun, menggunakan pendekatan Foucault ini. Dari pengamatannya tersebut Said mendapatkan kesimpulan bahwa citra tentang Timur telah dibangun oleh Barat. Wacana Barat mengenai orient telah membangun pengetahuan tentang Timur dan pada relasi "kekuasaan-pengetahuan" diartikulasikan pada kepentingan kekuasaan Barat. Barat (Eropa) mengontraskan ide, personality serta pengalamannya dengan menyatakan bahwa kalau Barat dianggap beradab, superior, maju, dan rasional maka Timur dikatakan inferior, tidak beradab, terbelakang, dan tidak rasional. Said menggunakan gagasan Foucault dalam melihat bahwa kebenaran sebuah wacana tidak banyak tergantung pada apa yang dikatakan, tetapi lebih banyak ditentukan oleh siapa yang mengatakan, kapan, dan dimana itu dikatakan. Karena Barat dan Eropa mempunyai kekuasaan maka merekalah yang banyak bicara dalam banyak wacana tentang orient, sementara orient (Timur) sendiri tidak diberi kesempatan banyak bicara atas nama orient dan untuk orient. Akibatnya citra yang terbangun mengenai orient adalah hasil ciptaan Barat dan Eropa.

Ironisnya, semua yang dilakukan oleh peneliti akademis, misionaris, para pedagang bahkan para serdadu yang datang ke Timur adalah dengan konsep umum tentang orient dibawah payung kekuasaan hegemony barat.

Hal yang sama juga terjadi dalam proses membangun citra lelaki dan perempuan. Karena itulah maka Foucault menolak kebenaran mutlak. Ia menganggap kemutlakan mematikan kebenaran itu sendiri. Menurutnya suatu kebenaran harus dicari alasan-alasan yang menguatkan kebenaran itu. Dengan tegas Foucault menolak kebenaran yang hanya bersifat "taken-for granted" saja Baginya kebenaran pertama bisa saja digantikan oleh kebenaran yang lain bila itupun bisa diberikan alasan yang kuat. Itulah yang saya pahami dalam proses mencari dan memaknai fenomena-fenomena budaya, dan melihat kini bahwa laki-laki dan perempuan sebagai pelaku budaya telah menjadi korban, bahkan budak budaya itu sendiri.

Untuk memahami lebih lanjut tentang Kekuasaan, pengetahuan dan ahli pengetahuan, terlebih dahulu kita harus mengetahui pemikiran Michel Foucault

### **Pemikiran Michel Foucault tentang pembangunan dan modernisasi**

Postmodernisme lebih dikenal sebagai gerakan pemikiran dan bukan merupakan suatu teori perubahan sosial, namun, analisis dan kritik Postmodernisme terhadap proyek modernisme termasuk kritik. Michel Foucault merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam gerakan Postmodernisme, yang menyumbangkan perkembangan teori kritik terhadap teori pembangunan dan modernisasi dari perspektif yang sangat berbeda dengan teori-teori kritik lainnya (Mansour Fakhri, 2002).

Pada tahun 1980, Foucault diidentikkan dengan gerakan Postmodernisme, yaitu ketika ia menuangkan pemikirannya dalam beberapa tulisan, yaitu diantaranya *The Order of Things, The Archeology of Knowledge, Discipline and Punish, Language, Counter Memory, Practise, The History of Sexuality* dan *Power Knowledge*. Analisisnya yang terkait dengan discourse, power dan knowledge merupakan sumbangan yang besar terhadap kritik pembangunan. Menurutnya diskursus pembangunan merupakan alat untuk mendominasi yang dilakukan oleh Dunia Pertama

kepada Dunia Ketiga. Selama empat dekade terakhir, diskursus pembangunan menjadi strategi yang dominan dan digunakan sebagai alasan untuk memecahkan masalah “keterbelakangan” yang dirancang setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi, dalam kenyataannya keterbelakangan masyarakat tersebut adalah diakibatkan oleh kolonialisme yang berkepanjangan. Dengan dilontarkannya diskursus pembangunan tersebut maka tidak saja melanggengkan dominasi dan eksploitasi di negara Dunia Ketiga, tetapi diskursus pembangunan tersebut justru juga menjadi media penghancuran segenap gagasan alternatif masyarakat di negara Dunia Ketiga terhadap ideologi kapitalis.

Pemikiran Foucault yang utama adalah penggunaan analisis diskursus untuk memahami kekuasaan yang tersembunyi di balik pengetahuan. Analisisnya terhadap kekuasaan dan pengetahuan memberikan pemahaman bahwa peran pengetahuan pembangunan telah mampu melanggengkan dominasi terhadap kaum marjinal. Ia mencontohkan bahwa pembangunan di negara Dunia Ketiga merupakan tempat berbagai kekuasaan dunia sekaligus adanya hubungan penting tentang

berperanannya kekuasaan di negara-negara tersebut. Dalam karyanya tentang *A Critique of Our Historical Era* (dalam Wahyudi, 2006), Foucault melihat ada problematika dalam bentuk modern pengetahuan, rasionalitas, institusi sosial, dan subyektivitas. Semua itu, menurutnya terkesan *given and natural*, tetapi dalam faktanya semua itu adalah “serombongan konstruk sosiokultural tentang kekuasaan dan dominasi”. Selanjutnya, menurut argumentasinya bahwa hubungan antara bentuk kekuasaan modern dan pengetahuan modern telah menciptakan bentuk dominasi baru.

Bagi Foucault, selain eksploitasi dan dominasi, ada satu bentuk yang diakibatkan oleh suatu diskursus, yakni *subjection* (bentuk penyerahan seseorang pada orang lain sebagai individu, seperti pasien pada psikiater). Oleh karena itu, yang perlu dipelajari adalah upaya untuk membangkitkan kembali *local centres* dari *power knowledge*, pola transformasinya, dan upaya untuk masukkan ke dalam strategi dan akhirnya menjadikan pengetahuan mampu *mensupport* kekuasaan. Menurut pemikirannya, bahwa setiap strategi yang mengabaikan berbagai

bentuk power tersebut maka akan terjadi kegagalan. Untuk melipatgandakan power, harus berusaha bertahan dan melawan dengan jalan melipatgandakan resistensi dan kontra-ofensif. Localize-resistance tersebut haruslah bersifat radikal dan tanpa kompromi untuk melawan totalitas kekuasaan (daripada memakai cara revolusi massa), dengan strategi yang ditujukan untuk mengembangkan jaringan kerja perjuangan, kantong-kantong resistensi dan popular base. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah analisis power tertentu (antar individu, kelompok, kegiatan dan lain-lain) dalam rangka mengembangkan knowledge strategies dan membawa skema baru politisi, intelektual, buruh dan kelompok tertindas lainnya, dimana power tersebut akan digugat.

Pemikiran Foucault tentang kontrol penciptaan diskursus dan bekerjanya kekuasaan (power) pada pengetahuan sangat membantu para teoritis dan praktisi perubahan sosial untuk melakukan pembongkaran terhadap teori dan praktek pembangunan. Hal ini perlu diperhatikan karena tanpa menganalisis pembangunan sebagai suatu diskursus,

maka akan sulit untuk memahami bagaimana Negara Barat mampu melanggengkan kontrol secara sistematis dan bahkan menciptakan ketergantungan negara Dunia Ketiga secara politik, budaya dan sosiologi kepada Negara Barat tersebut. Meskipun underdevelopment adalah formasi sejarah yang riil, tetapi hal tersebut telah melahirkan praktek dominasi terhadap Dunia Ketiga. Sejarah dominasi tersebut telah terjadi sejak abad penaklukan "dunia baru" hingga saat ini. Sebelum tahun 1945, strategi dominasi dilakukan dengan menggunakan diskursus "dunia terbelakang", dan pada era pasca kolonialisme dengan mendirikan IBRD, tahun 1940an dan 1950an dominan dilakukan dengan diskursus pembangunan. Negara kaya, dengan kekayaan dan teknologinya, merasa mampu untuk menyelamatkan kemajuan dunia dengan menciptakan Marshall Plan, yang ditujukan untuk menjadikan negara miskin menjadi kaya, keterbelakangan berubah menjadi pembangunan.

Organisasi internasional diciptakan untuk tujuan tersebut, yang diperkuat dengan pengetahuan ekonomi baru dan diperkaya dengan desain sistem manajemen yang canggih, sehingga

membuat mereka menjadi yakin akan keberhasilannya. Dalam aplikasi dan kenyataan yang ada di negara Dunia Ketiga, telah terjadi intervensi yang mendalam atau terbentuk kekuasaan dan kontrol baru yang sangat halus baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan bidang lainnya. Dengan kata lain, Dunia Ketiga menjadi target dari kekuasaan dalam berbagai bentuk dari lembaga kekuasaan baru Amerika dan Eropa, lembaga internasional, pemodal besar (perusahaan transnasional) sehingga dalam beberapa tahun telah mencapai ke semua lapisan masyarakat. Dan ketika pembangunan mengalami krisis, diskursus baru telah dilontarkan, yaitu globalisasi, untuk melanggengkan subjection, dominasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh Negara Barat terhadap Dunia Ketiga.

Sumbangan terbesar Foucault terhadap teori dan praktek perubahan sosial adalah membuat teori ini lebih sensitif terhadap relasi kekuasaan dan dominasi dan menyadarkan kita bagaimana relasi kekuasaan (power) teranyam disetiap aspek kehidupan serta kehidupan pribadi, dan ini bertentangan dengan umumnya kenyataan ilmu sosial yang cenderung mengabaikan

“kekuasaan” dalam dunia ilmu pengetahuan, dan asumsi bahwa pengetahuan itu netral, obyektif dan tak berdosa.

Kecenderungan memandang bahwa kekuasaan hanya terpusat di negara ataupun kelas, bagi Foucault merupakan pengingkaran kenyataan, karena relasi kekuasaan terdapat pada setiap aspek kehidupan. Konsep tentang kekuasaan (power) ini memberikan pengaruh besar tentang bagaimana aspek dan pusat lokasi dari kekuasaan serta bentuk perjuangan untuk membatasi dan bagaimana berbagai kekuasaan. Jika umumnya kekuasaan hanya tertuju pada negara dan kelas elit, pemikiran Foucault membuka kemungkinan untuk membongkar semua dominasi dan relasi kekuasaan, seperti kekuasaan dalam pengetahuan antara para pencipta diskursus, birokrat, akademisi, dan rakyat miskin jelata yang “tidak beradab” yang harus disiplinkan, diregulasi dan “dibina” (Mansour Fakih, 2002).

Dalam artikelnya tentang relevansi karya Foucault bagi kajian Dunia Ketiga, Escobar (dalam Muhadi Sugiono, 1999) mencatat bahwa sekurang-kurangnya ada tiga strategi utama lewat mana doktrin dan teori

pembangunan dianggap berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan disiplin, yaitu normalisasi mekanisme. Strategi pertama disebut "inkorporasi progresif problem", yaitu teori-teori dan doktrin-doktrin pembangunan memuat berbagai problem yang harus mereka sembuhkan, artinya munculnya teori dan doktrin tersebut didahului dengan penciptaan problem pembangunan, yaitu "abnormalisasi", dan mereka selipkan dalam domain pembangunan, sehingga memberikan justifikasi bagi para penentu kebijakan dan ilmuwan Negara Barat untuk melibatkan dan mencampuri urusan domestik negara Dunia Ketiga. Strategi kedua disebut "profesionalisasi pembangunan", yaitu problem pembangunan atau abnormalisasi setelah dimasukkan ke dalam domain pembangunan, maka menjadi masalah teknis dan terlepas dari persoalan politis, sehingga dianggap lebih bebas nilai dan merupakan bahan penelitian ilmiah. Dengan demikian problem pembangunan telah diprofesionalisasi melalui kontrol pengetahuan. Strategi ketiga disebut "institusionalisasi pembangunan", yaitu doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan diberlakukan untuk berbagai level

organisasi atau institusi, baik lokal, nasional maupun internasional, dan kesemua itu merupakan jaringan dimana hubungan baru kekuasaan pengetahuan telah terjalin dengan rapi dan sangat kuat. Ketiga strategi tersebut menunjukkan bagaimana pemberlakuan doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan sebenarnya hanya untuk melayani kepentingan Negara Barat (Amerika Serikat) sebagai kekuasaan hegemoni dalam tatanan internasional pasca Perang Dunia Kedua dan bukan untuk kepentingan negara-negara Dunia Ketiga yang menjadi sasaran doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan tersebut.

### **Historisasi "miskin informasi" dan perpustakaan**

Munculnya internet dan semakin pentingnya ICT pada umumnya telah memberi kontribusi yang cukup mengenai sifat ketidakamanan perpustakaan dan ketidakpastian tentang peran perpustakaan masa depan. Konstruksi "miskin informasi" yang didasarkan pada dampak perubahan tersebut dimaksudkan untuk lembaga perpustakaan yang sering dicapai dengan menerapkan tujuan sejarah perpustakaan umum dan situasi pada



saat perpustakaan umum didirikan pada abad kesembilan belas.

Asosiasi "miskin informasi" dengan kemiskinan proletar (masyarakat awam) di abad kesembilan belas. Di satu sisi, hal itu menjadi kasus pengulangan sejarah itu sendiri. Di sisi lain, "kemiskinan informasi" dijadikan tradisi serta tempat dalam sejarah perpustakaan dan dengan alasan itu kontinuitas ditetapkan. konsekwensinya, "miskin informasi" terkait erat dengan "perhatian sejarah perpustakaan bagi keadilan sosial" dan dihadirkan sebagai "tanggung jawab tradisional" dari perpustakaan umum. Pada gilirannya hal ini mengacu pada masa lalu yang menetapkan kontinuitas yang memberikan kontribusi untuk stabilisasi lembaga perpustakaan sekarang dan juga peran dan tujuan di masa depan.

### **Tanggung jawab profesi (pustakawan) dan kewajiban moral**

Yang sangat produktif dan terutama akibat prosedur diskursif muncul melalui asosiasi "kemiskinan informasi" dengan kepedulian moral atau politik sudah terjerat dengan gambaran penderitaan dan penindasan yang kuat. Sering kali, retorika ekonomistik, kecenderungan historisasi

dan penekanan pada keunggulan teknologi dimasukkan ke dalam layanan untuk menegakkan kembali lebih lanjut dan melegitimasi prosedur diskursif ini. Rasa keprihatinan dan kebenaran etika yang dikonstruksi atas kewajiban moral profesi perpustakaan untuk membantu kelompok "miskin informasi" yang terkonstruksi.

Ada hubungan yang jelas antara kebutuhan "miskin informasi" dan kemungkinan-kemungkinan profesi untuk mengurangi kekurangan yang demikian mapan (established deficiency), yang biasanya dinyatakan dalam berbagai bentuk buta huruf atau sebagai ketidakmampuan teknologi.

Peran perpustakaan umum dalam suatu "masyarakat informasi" menggambarkan hubungan antara "miskin informasi" dan peran profesi. "Bahwa peran profesi pustakawan dalam menciptakan masyarakat melek huruf dan tidak termarginalkan. Maka perlu menjamin bahwa pengguna perpustakaan itu bukan hanya bagian dari pengguna tradisional saja yang menjadi bagian dari dunia informasi ini, tetapi juga menjangkau pengguna lain. Maka diperlukan kebijakan untuk pendidikan dan

pelatihan bagi pustakawan dan pengguna perpustakaan.

Sekali lagi, konstruksi "miskin informasi" secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab profesi dan, terlebih lagi, ke pendidikan. Sedangkan sesuai dengan yang telah diidentifikasi retorika ekonomistik, konsep "miskin informasi", di sini diidentifikasi sebagai masyarakat buta huruf, kaum miskin dan masyarakat pedesaan, harus berubah menjadi konsumen. Hal ini dapat dilihat yang berhubungan langsung dengan persepsi "masyarakat informasi" didominasi internet di mana internet didefinisikan hanya signifikansi (makna) ekonomi yang lebih luas dan informasi itu sendiri diberi status sebagai komoditi ekonomi. [57] Frohmann (1994). Beberapa berpendapat, dalam konteks ini, yang secara khusus masyarakat pembangunan diarahkan untuk membangun informasi pasar baru untuk modal.

Hubungan tentang "miskin informasi" ini dengan lembaga perpustakaan pada tingkat etis juga dapat dipertimbangkan dalam pandangan konsep Foucault tentang kekuasaan pastoral(2000, hlm. 332-6). Berdasarkan kekuasaan pastoral, Foucault mengacu pada teknik

kekuasaan berorientasi keselamatan. Dalam kasus perpustakaan, dapat digambarkan berperan sebagai agen keselamatan. Yang paling penting, keselamatan dapat memiliki berbagai makna, seperti kesehatan, kualitas hidup, kekayaan, atau apa pun yang dianggap sebagai pernyataan yang diinginkan pada waktu yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda, termasuk misalnya menjadi terhubung ke internet, melek huruf, atau menjadi bagian dari sebuah "masyarakat informasi".

## E. SIMPULAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, merubah gaya hidup dan pola berpikir masyarakat sangat signifikan. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan juga sangat beragam yang menghasilkan prestasi luar biasa bagi masyarakat yang ingin maju. Perpustakaan dan pustakawan mempunyai peran dalam menciptakan masyarakat melek informasi dengan program literasi informasinya. Dengan mengenalkan layanan perpustakaan kepada masyarakat, sebagai upaya untuk mengentaskan kesenjangan perolehan informasi, ini menunjukkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai agen

keselamatan yang bermakna dapat menjadi penghubung ke internet, melek literasi atau menjadi masyarakat yang memiliki kekayaan informasi. Keberadaan perpustakaan sangat signifikan kaitannya dalam penyediaan akses informasi yang cepat, tepat dan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Administrative Committee on Coordination, 1997. Statement on Universal Access to Basic Communication and Information Services .United Nations Publications, New York.
- Anak Ceremai. 2008. Makalah Filsafat Ilmu Tentang Hubungan Ilmu dan Filsafat.  
<http://www.anakciremai.com/2008/04/makalah-filsafat-ilmu-tentang-perbedaan.html>. Diakses tanggal 5 September 2022
- Britz, Johannes J. 2004. To Know or not to Know: A Moral Reflection on Information Poverty. *Journal of Information Science*,; 30; 192.  
<http://jis.sagepub.com/cgi/content/abstract/30/3/192> (diakses tanggal 02 Desember 2022)
- Escobar, A. (1995), *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*, Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Feather, John. 1994. *The Information Society: A Study of Continuity and Change*. London: Facet Publishing.
- Foucault, M. (2000), "The subject and power", in Foucault, M. (Ed.), *Power. Essential Works of Foucault 1954-1984*, Vol. 3, Penguin Books, London, pp. 326-48.
- Frohmann, B. (1994), "Discourse analysis as a research method in library and information science", *Library and Information Science Research*, Vol. 16 No. 2, pp. 119-38.
- Jutta Haider, David Bawden.(2007). Conceptions of "information poverty" in LIS: a discourse analysis. *Bradford: Journal of Documentation*. Vol. 63, Iss. 4; pg. 534.  
<http://proquest.umi.com/pqdweb?index=9&did=1369327971&SrchMode=1&sid=2&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1258430476&clientId=45625>
- Pendit, Putu Laxman. 2006. *Ragam Teori Informasi*. Diakses pada tanggal 2 Desember 2022. Tersedia dalam <http://eprints.rclis.org>
- Reeheartly.com. 2009. Hubungan dan Pengetahuan dalam Membangun "Citra".  
[http://www.freeheartly.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=21&Itemid=27](http://www.freeheartly.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=27). Diakses tanggal 5 September 2022
- Reyog City. 2007. *Pemikiran Michel Foucault*.  
<http://ssantoso.blogspot.com/2007/08/pemikiran-michel-foucault-1926-1984.html>. Diakses tanggal 6 September 2022
- Rhoni Rodin (2020). *Library is librarian: perpustakaan dan pustakawan di era*

milenial dan 4.0. Graha Ilmu.  
Yogyakarta

Laksmi(2020),  
Yu, L. (2006), "Understanding  
information inequality: making sense  
of the literature on information and  
digital divides", Journal of  
Librarianship and Information  
Science, Vol. 38 No. 4, pp. 229-52.